

# Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

<sup>1</sup>Yiyin Antias Wahyuningsih, <sup>2</sup>Ilmi Usrotin Choriyah

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Korespondensi : ilmiusrotin@umsida.ac.id

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam pencegahan stunting di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, catatan dan penggunaan data primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih informal yaitu kepala desa, kader posyandu, ketua kader, dan staff pelayanan. Dengan menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Tropodo yaitu pertama ketersediaan sarana dan prasarana dimana Desa Tropodo telah berupaya memberikan alat posyandu. Kedua ketersediaan anggaran dimana pemerintah Desa Tropodo telah mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan pencegahan stunting. Ketiga kemitraan dimana petugas kesehatan memberikan edukasi terkait pencegahan stunting. Keempat partisipasi masyarakat dimana masyarakat Desa Tropodo mendukung dalam program pencegahan stunting.

**Kata kunci:** Peran, Pemerintah Desa, Pencegahan Stunting

## Abstract

The aim of this research is to analyze and describe the role of village government in preventing stunting in Tropodo Village, Krian District, Sidoarjo Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews, observations, notes, and the use of primary and secondary data. In this case, the author employed purposive sampling by selecting informants such as the village head, posyandu cadres, cadre leaders, and service staff. Data analysis is conducted using the Miles and Huberman model, which involves data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that the role of Tropodo Village government includes: first, the availability of facilities and infrastructure, where Tropodo Village has made efforts to provide posyandu tools. Second, budget availability, where the Tropodo Village government has allocated funds for stunting prevention activities. Third, partnerships, where health workers provide education related to stunting prevention. Fourth, community participation, where the residents of Tropodo Village support stunting prevention programs.

**Keyword:** Role, Village Government, Stunting Prevention

## 1. PENDAHULUAN

Balita merupakan kelompok pada masa pertumbuhan dan perkembangan pesat dalam hal berpikir, berbicara, panca indra. Namun balita juga rentan mengalami permasalahan kesehatan sehingga perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan gizi untuk mendukung tumbuh kembangnya (Suhartatik & Al Faiqoh, 2022). Jika balita tidak mampu mencapai pertumbuhan secara optimal dapat mengalami kesakitan, kematian, hambatan pertumbuhan motorik maupun mental, dan dapat menurunkan produktivitasnya di masa yang akan datang (Haskas, 2020). Permasalahan yang banyak dialami balita salah satunya adalah kondisi stunting.

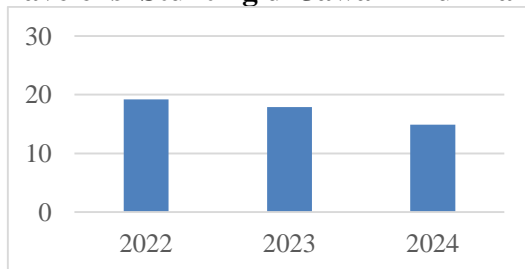
Stunting adalah bentuk kegagalan pertumbuhan (*growt faltering*) akibat ketidakcukupan nutrisi pada saat hamil sampai usia 24 bulan (Hoffman et al,2000; Bloem et al 2013). Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi balita stunting berdasarkan indek Tinggi Badan menurut umur (TB/U) menurut standar WHO (Picauly & Toy, 2013) secara sederhana stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan seorang anak lebih pendek dibandingkan dengan tinggi anak lainnya yang sesuai dikarnakan kurangnya asupan gizi saat berada dalam janin atau bayi (Kementrian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, 2017). Permasalahan gizi buruk merupakan tantangan bagi seluruh negara karena permasalahan gizi membawa dampak negatif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjangnya dalam mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang akan menurun, tidak mampu bersaing, kemiskinan dan banyaknya pengangguran.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas membuat negara menjadi maju. Hal ini bisa kita lihat dari status gizi yang baik pada balita dengan melihat seberapa banyak makanan yang mereka konsumsi. Jika ada masalah terkait gizi buruk dapat disebabkan oleh pola makanan anak seperti pola asuh anak, kurangnya ketersediaan makanan yang bergizi, serta faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Maka dari itu stunting menjadi target dalam Sustainable Development Goals (SDGS) yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan untuk mengentaskan kelaparan dan menghilangkan segala bentuk malnutrisi dan dapat mencapai Zero Hunger (HASKAS, 2020). Pemerintah berusaha menyusun strategi untuk penurunan stunting di daerah dengan target kurang dari 20%. Meskipun pemerintah sudah berusaha untuk menurunkan angka stunting tetapi hambatannya tetap tinggi yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang lebih besar di Indonesia.

Penyebab terjadinya stunting bisa terjadi saat janin masih di dalam kandungan karena asupan gizi kurang mencukupi, atau tidak sesuai pola makannya. Karna praktik gizi yang tidak tepat dan kurangnya pengetahuan dapat menjadi masalah dalam meningkatkan gizi karena masih banyak orang tidak mengetahui tentang gizi selama kehamilan dan dua tahun pertama. Anak dalam masalah pertumbuhan yang terlambat memiliki IQ yang lebih rendah di bandingkan dengan IQ anak-anak yang normal (Kemenkes Ri,2018). Terjadinya stunting juga memperngaruhi kecerdasan pada anak. Waktu yang diperhitungkan untuk mencegah stunting adalah waktu hidup anak dalam 1000 hari sejak anak dalam kandungan. Tidak hanya pola gizi saja yang diperhatikan, faktor pendidikan, faktor lingkungan , kebersihan juga harus diperhatikan. Faktor penyebab terjadinya stunting juga bisa berasal dari penyakit infeksi selain pola makan dari ibu.

Di Indonesia sendiri, stunting merupakan masalah yang serius dimana prevalensi stunting di Indoensia tertinggi di tingkat Regional Asia Tenggara berada di angka 36,4%. Dalam penanganan stunting ini, pemerintah membuat kebijakan melalui program nasional Kementrian Sosial seperti bantuan pangan sembako dan program keluarga harapan (PKH) dengan adanya kebijakan tersebut angka prevalensi mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dalam SSGI (Status Gizi Indonesia) dimana pada tahun 2021 kasus stunting menurun sebanyak 24, 4%, lalu pada tahun 2022 menurun kembali menjadi 21,6%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 17,8%, angka ini terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 kasus stunting di indonesia mencapai pada angka 14%.

**Diagram 1. Pravelensi Stunting di Jawa Timur Tahun 2022-2024**



Sumber : Survei Status Gizi (2024)

Berdasarkan data kasus stunting dalam cakupan wilayah provinsi, wilayah Provinsi Jawa Timur didasarkan pada data diatas mendapatkan penurunan kasus stunting yang cukup baik. Dimana pada tahun 2022 prevalensi stunting mencapai 19,2%, lalu mengalami menurun menjadi 17,9% di tahun 2024 menjadi 14,92%. Tingkat penurunan ini tentu mencakup keseluruhan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, salah satunya Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai salah satu wilayah kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dapat membuktikan untuk menjadi salah satu wilayah yang dapat menurunkan tingkat prevalensi kasus stunting. Hal ini dibuktikan dalam data yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada tahun 2022 angka stunting mencapai 16,1 persen, di tahun 2021 mencapai 14,8 persen dan ditahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8,4 persen. Sekitar 34.000 anak yang mengalami stunting anak usia 0-59 bulan atau di bawah 5 tahun. Walaupun telah mengalami penurunan kasus stunting yang cukup signifikan, Kabupaten Sidoarjo masih harus memberikan solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan lebih baik lagi.

Untuk mengatasi prevalensi stunting ini pemerintah membuat langkah untuk menangani masalah. Langkah tersebut diwujudkan dalam bentuk pilar percepatan penurunan stunting. Pemerintah berharap lima pilar menurunkan dan mencegah stunting ini dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat perdesaan (Media Indonesia 2019). Pilar pertama adalah komitmen dan visi kepemimpinan. Langkah tersebut untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan. Pilar kedua adalah kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Pemerintah berharap akan timbul kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting. Pilar ketiga adalah konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Pilar keempat, strategi percepatan dan pencegahan angka stunting adalah ketahanan pangan dan gizi. Pilar kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi adalah upaya untuk memastikan bahwa apa yang sedang dijalankan benar-benar berjalan sesuai apa yang telah direncanakan (Media Indonesia, 2019)

Penanganan dan pencegahan stunting merupakan aplikasi dari undang-undang sebagai pedoman penanganan stunting. Dalam pedoman tersebut diharapkan dapat menurunkan kejadian stunting secara nasional. Pedoman tersebut antara lain Undang-Undang Kesehatan Nomer 36 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomer 42 Tahun 2013 tentang Kampanye Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 23 Tahun 2014 tentang inisiatif Gizi dan Stunting, termasuk bantuan lain dalam pengelolaannya (Ipan, Purnamasari H, 2021)

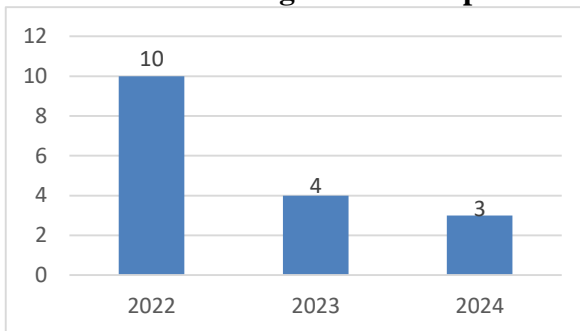
Implementasi Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat membantu dalam pencegahan stunting pertumbuhan desa. Salah satu implikasi UU Desa adalah sejak tahun 2015 telah tersalurkan dana desa. Dana tersebut dijadikan sebagai penetapan prioritas penggunaan dana dimana prioritas tersebut digunakan di bidang kesehatan seperti perbaikan gizi untuk mencegah stunting. Peran pemerintah desa sangat penting dalam menurunkan angka stunting.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan peraturan negara sebagai usaha untuk melindungi kearifan lokal. Undang-Undang Desa dibentuk sebagai respon terhadap adanya suatu implementasi yang dibentuk oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk mampu memberikan pengakuan hak asal-usul desa, demokrasi, musyawarah dan gotong-royong (Suhartono et al., 2020). Pradana (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagai pemerintahan tingkat dasar memiliki peran penting untuk mencegah kasus stunting. Salah satunya dengan upaya membangun kerja sama antara pemerintah desa, badan desa serta remaja setempat untuk membentuk suatu program yang mengarah pada penurunan stunting.

Desa Tropodo Krian, sebagai salah satu desa di Kecamatan Krian yang tidak terlepas dari permasalahan stunting balita. Kondisi ini menjadi tugas yang tidak ringan bagi pemerintahan desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. terjadinya stunting berkaitan erat dengan status gizi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah desa untuk menurunkan angka

pravelensi stunting pada balita melalui program program yang relevan dengan kondisi masyarakat. Kasus stunting pada balita di Desa Tropodo ini tidak terlepas dari rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi balita. Rendahnya pemenuhan gizi balita balita yang ada di Desa Tropodo Krian dipengaruhi oleh pola asuh anak. Hal ini bisa dilihat dari diagram dibawah ini:

**Diagram 2. Data Balita Berisiko Stunting di Desa Tropodo Krian Tahun 2022-2024**



Sumber : Kader Posyandu Tropodo Krian

Berdasarkan tabel di atas ini menunjukkan adanya penurunan angka stunting di Desa Tropodo Krian, dimana pada tahun 2022 balita yang berisiko stunting ada 10 balita, lalu ditahun 2023 terjadi penurunan menjadi 4 balita dan ditahun 2024 menjadi 3 balita. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan Desa Tropodo Krian keberhasilan penurunan stunting dipengaruhi oleh Peran Pemerintah Desa, yang membuat program-program untuk pencegahan stunting. Berikut adalah program-program pemerintah desa yang dapat mencegah stunting di Desa Tropodo Krian

**Tabel 1. Program-Program Untuk Mencegah Stunting**

| No | Nama Program         |
|----|----------------------|
| 1. | Posyandu Remaja      |
| 2. | Kelas Ibu Hamil      |
| 3. | Pendamping Ibu Hamil |
| 4. | Posyandu Balita      |

Sumber : Pemerintah Desa Tropodo Krian (2024)

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Desa di Tropodo Krian membuat program-program seperti, Posyandu Remaja, Kelas Ibu Hamil, Pendamping Ibu Hamil dan Posyandu Balita guna untuk mencegah stunting di Desa Tropodo, pemerintah desa juga memiliki peran penting untuk memberikan dukungan terhadap adanya program-program diatas. Meskipun program-program diatas belum sepenuhnya terlaksanakan dengan optimal. Pemerintah Desa Tropodo Krian juga terus berusaha untuk menurunkan angka pravelensi terjadinya stunting dan berharap Desa Tropodo mencapai Zero Stunting.

Berdasarkan penelitian di atas masih ditemukan permasalahan di Desa Tropodo Krian seperti pertama, kurangnya sarana prasarana seperti tempat posyandu masih meminjam rumah warga atau rumah pak RW, kemudian alat timbangan dalam keadaan rusak, keterbatasan kursi tunggu sehingga masyarakat masih duduk dilesehan, kedua kurangnya partisipasi masyarakat atau kurangnya kesadaran masyarakat terkait pencegahan stunting, ketiga pendanaan tidak tepat waktu yang membuat belum optimalnya dalam pencegahan stunting, dan keempat karna faktor lingkungan, di Desa Tropodo banyak industri tahu, dimana limbah pembakaran plastik dapat mengganggu pencernaan yang berkontribusi pada stunting.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting diantaranya adalah peneliti lain yang dilakukan oleh Fina Aura Regita dan Ananta

Prathamam (2023) berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi” di Desa Wedoro Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, peran pemerintah Desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan membuat program pos gizi, yang sosialisasinya melalui program ibu hamil dan memberikan imunisasi untuk pengobatan infeksi atau penyakit. Namun dikarenakan fasilitas kesehatan yang terbatas, apabila terjadi penyakit stunting serius, kader kesehatan memberikan rekomendasi kepada puskesmas maupun tenaga kesehatan yang lebih profesional. Sedangkan peran dalam intervensi gizi sensitif, yakni melalui penyaluran bantuan sembako, pemantauan bulanan melalui posyandu dengan ditunjang KMS pendampingan stunting melalui kader. Namun dalam program konsultasi gizi belum efektif menarik minat atau kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan konsultasi online.. Kemudian dalam penyediaan air bersih dan sanitasi ditemukan masih ada masyarakat yang belum menggunakan akses air bersih yang tidak memadai.

Kedua, Penelitian lain yang dilakukan oleh Lailatus Suhroh dan Galih Wahyu Pradana, tahun (2021) berjudul “ Peran Pemerintah Desa Ko’olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan”. Dalam program Gopo (Gojek Posyandu) peran pemerintah desa dalam penekanan stunting maka ada 4 faktor yang harus diperhatikan. Diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana, dalam pelaksanaannya pemerintah desa Ko’olan yang memberikan bantuan berupa HT (Handy Talk) kepada pengurus Gopo untuk memberikan kemudahan komunikasi, pembelian alat imunisasi, PMT Gizi, timbangan dan kebutuhan lainnya dengan menggunakan dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa. Namun masih terdapat permasalahan yang pertama kurangnya anggaran dana desa, sehingga para anggota harus menggunakan swadaya masyarakat untuk membiayai terlaksananya program ini agar dapat berlangsung dengan baik, kedua jauhnya jarak tempuh antara lokasi penjemputan anggota posyandu dengan tempat pelaksanaan kegiatan, yang menjadi hambatan tersendiri dalam proses penjemputan, ketiga minimnya sumber daya manusia yang bergabung dalam gojek posyandu, sehingga kader posyandu sebagai pengelola program ini membutuhkan peranan pemerintah desa untuk mampu menggerakkan fungsi Karang Taruna guna memaksimalkan berjalannya program gojek posyandu. Dalam suatu organisasi khususnya dalam pemerintah, sumber daya manusia menjadi penentu organisasi untuk memperoleh keberhasilan. Tingginya kompetensi sumber daya manusia disuatu organisasi mampu mempengaruhi kualitas instansinya.

Ketiga, penelitian lain yang dilakukan oleh Tri Nur Azizah dan Isna Fitria Agustin (2022) berjudul “ ( Nugraheni & Malik, 2023) ( Nugraheni & Malik, 2023) Kabupaten Sidoarjo”. Peran pemerintah Desa Sukodono. Peran pemerintah Desa Sukodono yaitu pertama ketersediaan sarana dan prasarana dimana pemerintah desa telah berupaya menyediakan alat posyandu. Kedua ketersediaan anggaran dimana pemerintah Desa Sukodono telah menganggarkan sebesar Rp. 108.612.800 yang digunakan untuk pembelian sarana dan prasarana program penurunan stunting. Ketiga kemitraan dimana terdapat tiga pihak yang berperan yaitu Pemerintah Desa yang bertugas memberikan fasilitas dalam pelaksanaan program penurunan stunting, Petugas Kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan gizi dan Rumah Sakit Umum Daerah yang bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program stunting. Terakhir adalah partisipasi masyarakat dimana masyarakat Desa Sukodono mendukung penuh terhadap penurunan angka stunting. Selain itu pemerintah desa juga berupaya dalam mensosialisasikan pentingnya dampak stunting kepada calon pengantin.

Teori yeti (2014) dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dan peran pemerintah melalui 4 indikator yaitu 1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana merupakan suatu langkah awal pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan. Sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat, memperbarui dan menyediakan sarana dan prasarana agar berlangsungnya peran pemerintah yang optimal dan maksimal, 2) Ketersediaan

anggaran merupakan lingkup pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayanan masyarakat. finansial adalah suatu rencana keuangan yang mencatat pengeluaran serta penerima tentang periode waktu tertentu. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivator, juga sebagai sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi serta alat yang berfungsi sebagai koordinator seluruh unit dalam melakukan aktivitasnya pada pemerintah, 3) Kemitraan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan merupakan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat. 4) Partisipasi dari masyarakat Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan sorotan utama, karena masyarakat berada pada posisi subyek dan obyek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## 2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dimana penelitian deskripsi sendiri diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan output data deskriptif yang berasal dari hasil wawancara dan observasi pada orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini digunakan karna peneliti berusaha mengamati dan mengungkap kejadian dilapangan mengenai peran desa dalam pencegahan stunting di Desa Tropodo Krian, Kabupaten Sidoarjo. Fokus kajian pada peneliti ini bertujuan untuk mengetahui seberapa peran desa dalam pencegahan stunting di Desa Tropodo Krian, Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan konsep teori Yeti Heryati (2014) mengenai peran pemerintah desa yang terdiri dari empat indikator. Yaitu 1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana, 2) Ketersediaan Anggaran, 3) Kemitraan, 4) Partisipasi Masyarakat. Pemeilihan informal tersebut dengan cara purposive sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap mengerti mengenai topik permasalahan yang diangkat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan ke informan yaitu kepala desa Tropodo Bapak Haris Iswandi, S.Pt, kader pemberdaya masyarakat Bu Ima, ketua kader posyandu Bu Dian dan Staff Pelayanan desa Tropodo Mas Donny. Sehingga peneliti mendapatkan makna dalam topik. Cara selanjutnya dengan cara observasi dimana peneliti mengamati dan mencatat mengenai peran desa dalam pencegahan stunting. Cara yang terakhir yaitu dengan cara dokumentasi dimana dalam tahap ini peneliti mengumpulkan dan menyimpulkan data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang dijadikan sebagai bahan topik peneliti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan teori Miles dan Huberman dimana teori tersebut terbagi menjadi empat bagian yakni pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meyeleksi data-data yang didapat selama pengumpulan data. Kedua penyajian data telah diseleksi dimana data yang ditampilkan adalah data primer dan terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia mengesahkan Perpes Nomer 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting di Desa Tropodo menjadi Rujukan Penanggulangan Stunting. Desa Tropodo adalah desa yang terletak di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dalam menekankan percepatan angka prevelensi stunting di Desa Tropodo krian pemerintah desa berkerja sama

dengan kader posyandu dengan membuat program pencegahan stunting. Program pencegahan prevalensi stunting di Desa Tropodo telah dilakukan sejak tahun 2021 dan terdapat 8 posko kesehatan di Desa Tropodo Krian untuk penurunan stunting.

Dengan adanya permasalahan stunting ini maka pemerintah Desa Tropodo berperan besar dalam penurunan angka resiko stunting ini. Untuk mengkaji mengenai peran pemerintah Desa Tropodo maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori Yeti Heryati (2014) yang terdiri dari empat indikator yaitu 1) Ketersediaan Sarana dan Prasarana, 2) Ketersediaan Anggaran, 3) Kemitraan, 4) Partisipasi Masyarakat. Adapun analisa peranan pemerintah Desa Tropodo menurut teori Yeti Heryanti (2014) dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

### 1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Keberhasilan Pemerintah Desa Tropodo dalam mencegah stunting, dapat dilihat dari adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang keberhasilan suatu program. Ketersediaan Sarana dan Prasarana menurut teori Yeti Heryati (2014) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi atau mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam hal ini sarana dan prasarana ditujukan untuk digunakan dalam kegiatan posyandu dan kesehatan desa. Dimana sarana dan prasarana tersebut seperti alat ukur berat badan, alat imunisasi, alat tinggi badan, kursi, meja, dan tempat kegiatan posyandu, penggunaan sarana dan prasarana agar warga desa Tropodo dapat mengakses sarana dan prasarana kesehatan dengan baik dan mempermudah pemerintah desa dalam melaksanakan program pencegahan stunting. Salah satu penjelasan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana yang disampaikan oleh Pak Haris S, Pt selaku Kepala Desa Tropodo Krian sebagai berikut ini :

*“Kalau terkait sarana dan prasarana pihak pemerintah desa sudah memfasilitasi kebutuhan untuk kesehatan seperti timbangan, alat ukur tinggi badan, kursi, meja dll. Kegiatan posyandu dilakukan di balai RW, namun ada beberapa post yang masih meminjam teras rumah warga, alat-alat juga bisa ditiptkan di rumah warga. Biasanya bidan desa atau kader posyandu membuat list cacatan keperluan yang dibutuhkan dalam posyandu, dan list catatan tersebut di berikan kepada pihak pemerintah desa, kemarin juga pihak kader mengajukan kursi.. ”. (Hasil Wawancara Tanggal 16 Mei 2024)*

Selain hasil wawancara dengan Pak Haris S, Pt hal tersebut juga disampaikan oleh Bu Ima selaku kader posyandu sekaligus kader pemberdaya masyarakat. Beliau mengatakan bahwa:

*“Pihak pemerintah desa sudah memberikan fasilitas yang kita perlukan untuk kegiatan kesehatan atau posyandu, kegiatan posyandu dilakukan di Balai RW, namun kebanyakan orang yang dari pribumi itu dilakukan di teras rumah warga, dan alat-alat ditiptkan di rumah warga yang ditempati. Kalau terkait masalah sarana prasarana kita ada RSD, dimana RSD itu adalah wadah untuk para kakor-kakor untuk berkoordinasi yang terbentuk dari beberapa kader dan pemerintah desa disatukan lalu berdiskusi, misalnya di tiap-tiap posyandu tidak punya APE, lalu ketua kader ngelist apa saja yang dibutuhkan, atau misalnya timbangan rusak, nanti diajukan ke pemerintah desa, saat sudah diajukan ke pihak pemerintah desa, tidak langsung dibelikan melainkan digodok oleh panita 11, panitia 11 terdiri dari kepala kader, bidan desa dan pihak dari pemerintah desa sendiri, dimana mana kebutuhan mana yang bisa dibuat jangka panjang, kebutuhan mana yang harus langsung dibelikan, atau yang bisa ditunda beberapa bulan lagi seperti itu. Terkait kursi memang kurang tapi saya sudah mengajukan ke pemerintah desa ”. (Hasil Wawancara Tanggal 09 Juli 2024)*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan posyandu sudah memadai dan pihak pemerintah desa selalu memberikan kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan posyandu dengan cara bidan desa mencatat keperluan yang dibutuhkan. Hal ini terlihat lengkapnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak pemerintah Desa Tropodo Krian. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, dapat membawahi suatu keberhasilan dalam kegiatan yang dapat mencegah stunting. Meskipun sarana dan prasana sudah memadai namun sangat disayangkan masih ada beberapa kekurangan seperti tempat kegiatan posyandu masih meminjam teras rumah warga, lalu alat-alat masih ditiptkan dirumah warga, kemudian alat timbangan dalam keadaan rusak, keterbatasan kursi tunggu sehingga masyarakat masih duduk dilesehan. Berikut ini adalah data ketersediaan sarana dan prasarana di Desa Tropodo.

**Tabel 2. Sarana dan Prasarana Posyandu Tropodo**

| No | Nama Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1. | Timbangan                 | 8      |
| 2. | Alat Ukur Tinggi Badan    | 8      |
| 3. | Lingkar Kepala            | 8      |
| 4. | Lingkar Perut             | 8      |
| 5. | Kursi                     | 8      |
| 6. | Meja                      | 8      |
| 7. | APE (Alat Peraga Edukasi) | 8      |
| 8. | Alat Imunisasi            | 8      |
| 9. | Termometer                | 8      |

Sumber : Data Diolah Penulis 2024

Dari hasil penelitiann diatas bahwa dari indikator ketersediaan sarana dan prasana di Desa Tropodo harus diperhatikan lagi walaupun sudah cukup baik namun masih ada kekurangan. Jika Ketersediaan sarana dan prasana di Desa Tropodo masih belum optimal membuat pencegahan stunting ini tidak mencapai keberhasilan yang diharapkan yaitu zero stunting. Maka dari itu ketersediaan sarana dan prsarana harus optimal dan baik agar masyarakat mampu memperoleh fasilitas kesehatan dengan baik, sehingga nantinya mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan suatu kegiatan yang dibentuk agar dapat terlaksanakan sesuai dengan target dan tujuan yang ingin dicapai.

Hal ini ada perbedaan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Desa Dalam Menekankan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian SDGS Desa Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. Yang dilakukan oleh Tri Nur Azizah dan Isna Fitria Agustin dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2022. Hasil yang di dapat dalam penelitian tersebut adalah untuk menurunkan angka stunting di Desa Sukodono maka pemerintah desa berupaya memberikan sarana dan prasarana yang optimal, sehingga dalam menjalankan program penurunan prevelensi stunting di Desa Sukodono sudah baik. Sarana dan prasaranan tersebut ditujukan untuk digunakan dalam kegiatan posyandu dan kegiatan kesehatan desa. Dimana sarana dan prasarana tersebut terdiri dari alat imunisasi, timbangan dan alat ukur tinggi badan dengan penggunaan alat tersebut berkoordinasi dengan petugas kesehatan desa meliputi bidan desa dan petugas posyandu. Tujuan diberikannya sarana dan prasarana ini agar warga Desa Sukodono dapat mengakses sarana dan prasarana kesehatan dengan mudah agar dapat melaksanakan program penurunan angka prevelensi stunting di Desa Sukodono. Sarana dan prasarana ini sering digunakan pada minggu ke 1 hari senin pada kegiatan posyandu di Desa Sukodono.

## 2. Ketersediaan Anggaran

Anggaran dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Proritas penggunaan anggaran dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Dengan adanya dasar hukum yang ada dana desa diharapkan mampu memberi manfaat yang besar bagi warga desa seperti peningkatan kualitas hidup atau pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik desa di Desa (Mea,2020). Ketersediaan Anggaran menurut teori Yeti Heryati (2014) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBD dimana Anggaran dana desa ini ditranfer ke rekening kas desa melalui rekening kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan atau pemberdayaan masyarakat. Anggaran desa juga sebagai motivasi masyarakat desa untuk kembali atau menetap untuk membangun desa melalui program pada karya dengan memanfaatkan potensi desa dan memberdayakan kemampuan warga. Kebijakan anggaran desa juga mengandung nilai ekonomis dan politis. Jika dilihat segi ekonomis, anggaran desa mampu meningkatkan infrastruktur serta mendorong produktivitas masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh suatu desa. Jika dilihat dari politis, melalui adanya anggaran desa secara tidak langsung mampu memacu kesadaran masyarakat akan haknya dalam meningkatkan pemerintah serta pembangunan. Anggaran menjadi suatu hal yang penting karena sumber finansial dari pemerintah merupakan suatu hal yang mampu memberikan motivasi kepada pegawai, sarana pengemban standar ukur kinerja yang mampu dijadikan sebagai evaluasi, serta fungsi sebagai koordinator seluruh unit kerja dalam aktivitas pemerintah.

Selaras dengan adanya penjelasan dan aturan terkait Pengalokasian Anggaran Desa. Pada Tahun 2020, Anggaran Dana Desa Tropodo Krian di fokuskan pada dua bidang, yaitu pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Alokasi dana desa untuk bidang pendidikan di fokuskan pada pembangunan sekolah, pembangunan paud, pembangunan TK, sedangkan dalam bidang kesehatan, dana yang tersedia dialokasikan untuk kegiatan posyandu, polindes dan kegiatan program pencegahan stunting. Pemerintah desa tropodo memberikan anggaran guna untuk pencegahan stunting hal ini dijelaskan oleh Pak Haris S,Pt selaku Kepala Desa Tropodo Krian sebagai berikut ini :

*“Kita selalu mengsuport dalam artian kegiatan atau keuangan yang berhubungan dengan stunting, dan juga masalah keuangan mendanaan kita juga suport, jadi prioritas saya dulu si kesehatan dan pendidikan, kalau tantangan pengolahan dana, karna dana itu kan mengambil dari dana desa, kita biasanya berembuk dengan pendamping desa, lokal desa Pak Ali Mustofa, sehingga biasanya kita berdiskusi dengan beliau, terkait masalah dana untuk kesehatan. Kebayakan mereka itu kan pengajuan-pengajuan itu mesti banyak dan tinggi , sedangkan keuangan kita tidak bisa mengcover semua yang dimau sama mereka, jadi kita memakai skala prioritas, prioritas mana yang harus kita dulukan, walaupun semuanya penting, karena terbatasnya dana mau ngk mau, harus dipotong yang bisa di geser. Kalau dana desa untuk benar-benar pencegahan stunting ya kurang, karna kan kita tidak terfokus pada satu kegiatan saja ”. (Hasil Wawancara Tanggal 13 Agustus 2024)*

Selain hasil wawancara dengan Pak Haris S,Pt hal tersebut juga disampaikan oleh Bu Ima selaku kader posyandu sekaligus kader pemberdaya masyarakat. Beliau mengatakan bahwa:

*“Anggaran dana yg kita butuhkan kyk rembuk stunting gitu kan, kita ngajukan, contoh seperti ini kyk ada balita” kita Dee dirasa gizinya kurang trus kyk stunting seperti itu kita ajukan ke balai desa, memang dana desa apbdes itu kan 20% untuk kesehatan, dana sudah sesuai apa yang direncanakan allhamdulillah, jadi sudah ada plot-plot, oh iki nanti targetnya satu anak balita gizinya kurang itu berapa ripu rupiah, terus dana yang diberikat untuk pencegahan stunting berapa nanti kita pikir oh dananya segini kita berikan apa biar dana nya pas seperti itu dirupakno”.(Hasil Wawancara Tanggal 09 Juli 2024)*

Berdasarkan wawancara penelitian diatas yang di sampaikan oleh kepala desa ditemukan bahwa ketersediaan anggaran untuk kegiatan atau program pencegahan stunting masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran untuk pencegahan stunting di Desa Tropodo Krian masih belum sepenuhnya optimal. Berikut ini adalah data ketersediaan Anggaran dana desa di Desa Tropodo dibawah ini :

**Tabel 3. Rincian Anggaran Kegiatan Pencegahan Stunting di Tropodo**

| Jenis Anggaran                                  | Jumlah Anggaran   |
|---|-------------------|
| Konsumsi Posyandu (56 Bayi x 8 Post x 12 Bulan) | Rp.48.000.000,00  |
| Biaya Transportasi Kader 56 orang               | Rp.33.600.000,00  |
| PMT Khusus Stunting                             | Rp. 21.000.000,00 |
| Kelas Ibu Hamil                                 | Rp. 3.475.000,00  |
| Kunjungan Balita Stunting                       | Rp. 4.000.000,00  |

Sumber: Data Diolah Penulis 2024

Dari hasil penelitian diatas dilihat dari indikator ketersediaan anggaran, peran pemerintah desa tropodo dalam menyediakan atau mengelola anggaran desa sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari pihak pemerintah desa selalu mengsupport dan memberi anggaran untuk kegiatan program pencegahan stunting. Anggaran dana desa ini digunakan untuk pencegahan stunting seperti untuk konsumsi kegiatan posyandu balita biaya transportasi kader, PMT untuk anak yang stunting, kelas ibu hamil dan kunjungan Balita yang terkena stunting. Berikut ini dokumentasi terkait program pencegahan stunting seperti kelas ibu hamil:

Gambar 1 : Kegiatan Kelas Ibu Hamil



Sumber : Pemerintah Desa Tropodo 2024

Gambar di atas merupakan kelas ibu hamil, dimana kelas ibu hamil ini salah satu upaya peran pemerintah desa dalam pencegahan stunting. Dalam program kelas ibu hamil tersebut pihak pemerintah desa memberikan anggaran dana desa dalam kegiatan tersebut guna melancarkan suatu program pencegahan stunting. Meskipun ketersediaan anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah desa sudah cukup baik namun masih ada terbatas anggaran. hal seperti ini yang membuat program untuk mencegah stunting tidak berjalan dengan optimal. Pemerintah desa Tropodo perlu meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, yang dilakukan dengan cara memperbaiki sistem dan pengelolaan anggaran dana yang baik, sehingga dibutuhkan satu reformasi untuk penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik terkait dengan anggaran dana

yang masuk ataupun keluar, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat, melalui akuntabilitas yang ada diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintah desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat (Arfiansyah Mufti Arief, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat persamaan dengan hasil “Peran Pemerintah Desa Ko’olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu ) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan”. Yang dilakukan oleh Lailatus Suhroh dan Galih Wahyu Pradana dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2021. Hasil yang di dapat dalam penelitian tersebut adalah dimana ketersediaan anggaran untuk penekanan stunting pemerintah desa bangkalan sudah menganggarkan RP. 18.000.000 untuk program Gopo (Gojek Posyandu) meskipun sudah dianggarkan untuk program tersebut namun masih ada kekurangan dimana ketersediaan anggaran yang diberikan pemerintah desa tidak cukup atau terbatasnya anggaran dana desa, sehingga para anggota harus menggunakan swadaya masyarakat untuk membiayai terlaksanakannya program Gopo (Gojek Posyandu) ini agar dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada alokasi anggaran dana desa yang diberikan khusus program Gopo posyandu.

### 3. Kemitraan

Menurut teori Yeti Heryati (2014) kemitraan merupakan Prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan value for money, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga mampu menciptakan suasana pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya kemitraan dapat mempengaruhi kinerja implementasi hubungan antar organisasi. Yang artinya implementor pada sebuah rencana program perlu memperoleh suatu dukungan, kerjasama ataupun koordinasi antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Oleh sebab itu, sejak ada pencegahan stunting pemerintah desa melakukan kerja sama dengan berbagai beberapa pihak. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak Haris S,Pt selaku Kepala Desa Tropodo Krian sebagai berikut ini :

*“Sebenarnya itu kalau stunting itu program kabupaten bearti ke kecamatan juga, dan juga puskesmas, ya akhirnya kita dari puskesmas akhirnya ada bidan desa, nah bidan desa itulah kita bisa berkolaborasi, dengan kader- kader kesehatan dan pihak puskesmas, seperti itu, maknya kadang-kadang kalau saya bilang Tropodo itu cerewet memang iya. Dari pihak puskesmas sendiri juga bergerak memberikan edukasi tentang pola asu makanan atau pola gizi, jadi sudah disupport sama desa juga di support sama pihak dinas kesehatan. kita juga bekerja sama dengan BPD (Badan Pengawas Desa) untuk mengawasi kegiatan pencegahan stunting”.* (Hasil Wawancara Tanggal 13 Agustus 2024)

Selain hasil wawancara dengan Pak Haris S,Pt hal tersebut juga disampaikan oleh Mas Donyy selaku Staff Pelayanan yang ada di Desa Topodo. Beliau mengatakan bahwa:

*“yang dimaksud kemitraan itu yang mengawasi kita dalam menjalankan program. Seperti di Pemerintah desa Tropodo kita bekerja sama dengan BPD (Badan Pengawas Desa) untuk mengawasi kegiatan kita salah satunya ya kegiatan pencegahan stunting, trus kita juga bekerja sama dengan ibu-ibu kader, karena kan suatu program pencegahan stunting ini kita melibatkan ibu-ibu kader dan bidan desa untuk melakukan kegiatan posyandu lalu bekerja sama dengan dinas kesehatan ”* (Hasil Wawancara Tanggal 09 Juli 2024)

Berdasarkan wawancara penelitian diatas yang di sampaikan oleh kepala desa dan staff pelayanan tentang peran pemerintah Desa Tropodo dalam pencegahan stunting sudah menjalin kerja sama atau kemitraan dengan pihak lain, kemitraan tersebut membuat suatu program terlaksanakan dengan baik. Berikut ini gambar saat kegiatan Desa Tropodo menjalin kemitraan dengan bidan desa, puskesmas dan pihak kesehatan.

Gambar 2 : Kegiatan Kemitraan



Sumber Data : Pemerintah Desa Tropodo 2024

Dari hasil penelitiann diatas dapat disimpulkan bahawa indikator kemitraan dipemerintahan Desa Tropodo sudah cukup baik. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting tentunya pemerintah desa tidak bisa melakukan sendiri melainkan membutuhkan peran dari para mitra. Beberapa pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk penurunan stunting di Desa Tropodo yakni menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah seperti dinas kesehatan, puskesmas, bidan desa dan juga kader posyandu. Seperti kader yang melakukan kegiatan posyandu, dinas kesehatan yang memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pola gizi atau pola asuh, dan bidan desa yang memantau pertumbuhan balita. Kerja sama tersebut secara tidak langsung memiliki tanggungjawab untuk mengawasi jalannya pelayanan publik yang ada di desa, yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat desa Tropodo.

Hal ini ada persamaan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Desa Dalam Menekankan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian SDGS Desa Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. Yang dilakukan oleh Tri Nur Azizah dan Isna Fitria Agustin dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2022. Hasil yang di dapat dalam penelitian tersebut adalah beberapa pihak dalam penurunan pravelensi stunting di Desa Sukodono juga menjalankan kemitraan dengan pemerintah desa, petugas kesehatan, kader kesehatan dan rumah sakit. Peran pemerintah desa yakni memberikan fasilitas dan mengkoordinasi pelaksanaan program penurunan stunting. Kedua peran petugas kesehatan yakni memberikan pelayanan gizi. Ketiga peran kader kesehatan unutm melakukan pendataan perkembangan balita. Adapun pemerintah desa bekerja sama dengan pihak eksternal yang terlibat adalah rumah sakit untuk memberikan edukasi mengenai stunting.

#### 4. Partisipasi Masyarakat

Menurut teori Yeti Heryati (2014) Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dari masyarakat yang menjadi pandangan utama, karena masyarakat berada pada suatu tempat yaitu subyek dan objek dari kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dianggap sangat penting karena merupakan suatu faktor yang dapat mengoptimalkan peran dari pemerintah yang menjadi subyek dan obyek kebijakan yang ikut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini pemerintah desa tropodo berharap dapat mencegah terjadinya stunting, Hal ini dijelaskan oleh Pak Haris S,Pt selaku Kepala Desa Tropodo Krian sebagai berikut ini :

*“Kendala kita sebenarnya gini orang tua anak yang tidak mau berkerja keras untuk anaknya, pola asuh nya itu nek ngk mau ya sudah, sedangkan tidak seperti itu, yaopo carane anak itu makan, kalau ngk mau ya yaopo balik lagi cara anak itu mau makan dengan pola gizi yang sehat, tapi kadang-kadang ibu itu akan kalau anaknya ngk mau sudah dibiarkan, sebenarnya itu yang menjadi kendala atau menjadi PR, sampai saya usul di puskesmas krian pada waktu ada dinas kesehatan sidoarjo yaopo buk kalau yang menyuapi itu bapak”, akhirnya semuanya protes, ya karna ibunya sudah ngk mau, akhirnya saya yang menyarankan gerakan suap bapak-bapak, kadang juga banyak ibu-ibu yang bekerja jadi ya dijarno mau makan ta ngk, ibu yang bekerja sudah kalau posyandu kadang ngk datang ya seperti itulah”. (Hasil Wawancara Tanggal 13 Agustus 2024)*

Selain hasil wawancara dengan Pak Haris S,Pt hal tersebut juga disampaikan oleh ketua kader yang ada di Desa Tropodo Bu Dian. Beliau mengatakan bahwa:

*“Partisipasi masyarakat ya dengan datang keposyandu, gini mbk orang tua balita kadang sibuk kerja, anaknya dititipkan ke mbah nya dan mbahnya sudah tua yg mengakibatkan tidak bisa datang keposyandu,, telak posyandu dengan tempat tinggal warga ya dekat, tetapi ada yg masih jauh yg mengakibatkan mereka malas datang keposyandu”. (Hasil Wawancara Tanggal 17 Mei 2024)*

Berdasarkan wawancara penelitian diatas yang di sampaikan oleh kepala desa dan ketua kader Bu Dian partisipasi masyarakat Desa Tropodo dengan cara mereka datang ke posyandu. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting adalah kunci untuk mengatasi permasalahan kesehatan ini secara efektif. Berikut ini kegiatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting dengan datang keposyandu:

Gambar 3 : Kegiatan Posyandu



Sumber : Pemerintah Desa Tropodo

Dari hasil penelitiann diatas dapat disimpulkan bahwa indikator partisipasi masyarakat Desa Tropodo mendukung dalam pencegahan stunting. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat selalu hadir dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Seperti datang keposyandu yang rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali pada hari kamis, dengan masyarakat datang keposyandu maka balita dapat dipantau perkembanganya, dan diberikan vitamin supaya mencegah terjadinya stunting. Namun masih ada kekurangan dimana pola asuh ibu balita sangat memprihatin, membiarkan anaknya tidak mau makan, hal seperti itu yang membuat balita kurang gizi, lalu masyarakat yang masih malas membawa anaknya pergi keposyandu di karenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat mengenai pentingnya mencegah stunting.

Hal ini ada persamaan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Desa Wedoro Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo”.Yang dilakukan oleh Fina Aura Regita dan Ananta Prathaman dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran pada tahun 2023. Hasil yang di dapat dalam penelitian tersebut adalah peran yang dilakukan pemerintah Desa dalam pencegahan dan penurunan stunting dengn

melakukan konsultasi gizi secara online program tersebut tidak menarik masyarakat atau kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penurunan stunting dikarenakan perilaku masyarakat yang lambat dalam menghadapi perubahan teknologi.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pencegahan stunting di Desa Tropido Krian dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut di buktikan dengan empat indikator untuk menganalisa peran pemerintah Desa Tropodo. Pertama pemerintah Desa Tropodo Krian telah menyediakan dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana seperti timbangan, alat tinggi badan, meja, kursi dan alat imunisasi namun masih ada kekurangan yaitu masih meminjam rumah warga dan kurangnya kursi. Kedua adalah penyediaan anggaran dimana pemerintah Desa Tropodo Krian telah menyediakan anggaran untuk digunakan dalam program pencegahan stunting meskipun anggaran tersebut masih terbatas. Ketiga pemerintah Desa Tropodo Krian sudah menjalin kerja sama atau kemitraan dengan kader dan bidan desa. Keempat yaitu partisipasi masyarakat Desa Tropodo Krian dalam pencegahan stunting dengan cara ikut serta melaksanakan kegiatan program posyandu. Namun masih ada masyarakat yang tidak mendatangkan balita mereka keposyandu hal tersebut karna kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azizah, T. N., & Agustina, I. F. (2023). Peran Desa Dalam Menekan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian. *Umsida Preprints Server*, 1-12.
- [2] Nugraheni, N., & Malik, A. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Mencegah Kasus Stunting di Kelurahan Ngijo Kota Semarang. *Lifelong Education Journal*, 1-10.
- [3] Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Rustianingsih, E. (2023). Tingkat Literasi Kesehatan Kader Posyandu dalam Pencegahan Prevalensi Stunting di Desa Tambak Kalisogo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2-15.
- [4] Anisyah, D., & Agustina, I. F. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Pencegahan Stunting di Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. *Umsida Preprints Server*, 3-10.
- [5] Hamdy, M., Rustandi, H., & Suhartini, V. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Menurunkan Angka Stunting. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 87-96.
- [6] Melik, N., Vestikowati, E., & Yuliani, D. (2022). Peran Kader Posyandu Dalam Pencegahan Stunting di Desa Sanding, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. *Repository Unigal*, 1-10.
- [7] Mitra. (2015). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah. *Jurnal Universitas Hang Tuah Pekan Baru*, 3-13.
- [8] Regita, F. A., & Prathama, A. (2023, April 1). Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan. *Sjias*, hal. 28-41.
- [9] Suhroh, L., & Pradana, G. W. (2021). Peran Pemerintah Desa Ko'olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Online Unesa*, 2-12.
- [10] Sukmana, H., & Putri, F. F. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Stunting di Desa Kedungkendo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. *Umsida Preprints Server*, 224-235.